

## PENGARUH TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH BULELENG

Komang Novita Sri Rahayu<sup>1</sup>, Luh Gede Kusuma Dewi<sup>2</sup>

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [Novirahayu174@gmail.com](mailto:Novirahayu174@gmail.com)<sup>1</sup>, [kusumadewi5758@gmail.com](mailto:kusumadewi5758@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah buleleng (Studi Kasus Di UPTD BPKPD PAD Kabupaten Buleleng). Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di UPTD PAD sejumlah 94 orang, teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 76 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literatur-literatur yang telah dipaparkan sebelumnya yang berkaitan dengan transparansi. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil dari penelitian Putra (2017). Dimana Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya jika dalam transparansi pengelolaannya baik, maka akan baik pula kualitas laporan keuangan suatu SKPD.

**Kata kunci** : Transparansi, Pengawasan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan

### Abstrak

*This study aims to determine the effect of regional financial transparency and supervision on the quality of Buleleng regional financial reports (Case Study in UPTD BPKPD PAD Buleleng Regency). The population of this research is all employees who work in UPTD PAD as many as 94 people, the sample technique used is purposive sampling. The number of samples in this study were 76 respondents. The data analysis technique in this research is quantitative using multiple linear regression analysis. The results of the study show that (1) Transparency has a positive and significant effect on the quality of financial reports, (2) Financial Supervision has a positive and significant effect on the quality of financial reports. These results certainly support the theories from the previously described literature related to transparency. The results of this study are also similar to the results of Putra's research (2017). Where transparency has a positive effect on the quality of regional financial reports. This means that if the transparency of the management is good, the quality of the financial reports of an SKPD will also be good.*

*Keywords: Transparency, Financial Supervision, Quality of Financial Reports*

## PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 71 Tahun 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Seiring dengan adanya otonomi daerah, maka diberikan hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan

prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur antara lainnya pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Keuangan Daerah (BKD).

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai tahun 2019 secara berturut – turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, walau Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat opini WTP namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Adapun catatan-catatan dari BPK seperti realisasi pendapatan yang belum tercapai dan adanya potensi pajak yang hilang. Rekapitulasi temuan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Rekapitulasi Temuan Pemeriksaan

No	Temuan
1	Potensi penerimaan pajak dan retribusi yang hilang
2	Realisasi pajak dan retribusi yang belum tercapai/tidak mencapai target
3	Hasil penerimaan pajak dan retribusi yang tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun

(Sumber: BPKP Bali, 2018:43)

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2015) dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir) bahwa Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan

teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Arfianti (2018) menyatakan bahwa Kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan perbandingan dua penelitian ini maka didapatkan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2006:18) Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan,

keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Putra (2017) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya jika dalam transparansi pengelolannya baik, maka akan baik pula kualitas laporan keuangan suatu SKPD. Hasil penelitian Putra juga didukung oleh penelitian Sriwijayanti (2018) yang menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan.

H<sub>2</sub> : Pengawasan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Yosa (2010), pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, kebenaran pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung dan sejalan dengan hasil penelitian dari Putra (2017) yang menyatakan bahwa Pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, dan tersistem maka kualitas laporan keuangan daerah akan baik pula.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di UPTD PAD Kabupaten Buleleng, (2) untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di UPTD PAD Kabupaten Buleleng.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menguji hubungan antara variabel bebas (X), pada penelitian ini adalah transparansi dan pengawasan keuangan. Metode pengumpulan data dengan instrumen penelitian ini berupa pengumpulan kuisioner. Data kemudian dianalisis dengan beberapa analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda dengan penyajian data dibantu program SPSS versi 21. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor UPTD PAD Kabupaten Buleleng. Sedangkan objek penelitian adalah transparansi ( $X_1$ ), pengawasan keuangan ( $X_2$ ) dan kualitas laporan keuangan (Y).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu (Sugiyono, 2017). Sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang bekerja di UPTD PAD Kabupaten Buleleng sejumlah 94orang. Teknik sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini yaitu 76 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Deskriptif

	X1	X2	X3
N	76	76	76
Mean	39.71	30.82	35.76
Median	40.00	31.00	36.00
Mode	40	31	36
Std. Deviation	0,745	0,706	0,563
Minimum	39	30	35
Maximum	42	33	37
Sum	3018	2342	2718

Sumber : *Output SPSS (2021)*

Dari tabel 2 maka dapat diketahui bahwa jumlah data adalah sebanyak 76 data. Diketahui X1 yang merupakan variabel transparansi memiliki nilai rata-rata sebesar 39,71 dengan standar deviasi sebesar 0,745. Variabel kapasitas sumber daya manusia juga

memiliki nilai minimum sebesar 39 dan nilai maksimumnya sebesar 42.

Untuk variabel X2 yang merupakan variabel pengawasan keuangan daerah diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 30,82 dengan standar deviasi sebesar 0,706. Variabel pengawasan keuangan daerah juga

diketahui memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimumnya sebesar 33.

Dan yang terakhir untuk variabel Y yang merupakan variabel kualitas laporan keuangan diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 35,76 dengan standar deviasi sebesar 0,563. Variabel kualitas laporan keuangan juga diketahui memiliki nilai minimum sebesar 35 dan nilai maksimumnya sebesar 37

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Analisis ini melibatkan lebih dari satu variabel prediktor (X) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda dengan melihat output SPSS pada table *model summary*.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.347	.343		15.605	.000
X1	.626	.096	.643	6.559	.000
X2	.008	.016	.009	2.494	.025

Sumber: Output SPSS 20.0 for windows (2021)

Dari tabel 4.3 didapatkan persamaan regresi yang dapat dituliskan adalah  $Y = 5,347 + 0,626 X1 + 0,008 X2$  dimana Y adalah kualitas laporan keuangan, X1 adalah transparansi dan X2 adalah pengawasan keuangan daerah.

Dari tabel 4.3 juga didapatkan nilai koefisien regresi X1 atau dalam penelitian ini adalah transparansi sebesar 0,626 adalah positif. Ini berarti transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi X1 adalah  $0,000 < 0,05$  yang ini berarti bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Juga dilihat dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,559 > 1,973$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dimana transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari tabel 4.3 juga didapatkan nilai koefisien regresi X2 atau dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan sebesar 0,008 adalah positif. Ini berarti pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi X2 adalah  $0,025 < 0,05$  yang ini berarti

bahwa pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Juga dilihat dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,494 > 1,973$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dimana pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

### Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  $H_1$  menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa aspek yang telah dilaksanakan oleh UPTD PAD Kabupaten Buleleng, salah satunya adalah dengan pembuatan laporan yang jelas dan detail serta sesuai dengan data pemungutan pajak yang didapatkan oleh pegawai pemungut pajak. Hal lain yang telah dilakukan sebagai bukti transparansi UPTD PAD Kabupaten Buleleng yaitu laporan keuangan mudah diakses melalui media website milik pemerintah. Sehingga meminimalisir tingkat kecurangan dalam pembuatan kualitas laporan keuangan.

Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literatur-literatur yang telah dipaparkan sebelumnya yang berkaitan dengan transparansi. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil dari penelitian Putra (2017). Dimana Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya jika dalam transparansi pengelolannya baik, maka akan baik pula kualitas laporan keuangan suatu SKPD. Penelitian sejalan yang dilakukan oleh Sriwijanti (2018) disebutkan menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan tentang transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan SIAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan. Dari hasil penelitian diharapkan kepada pejabat pengelola keuangan untuk lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pada SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang. Menurut Mardiasmo (2006:18) definisi transparansi adalah sebagai berikut: "Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan kata lain, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan

### **Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  $H_2$  menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa aspek yang telah dilaksanakan oleh UPTD PAD Kabupaten Buleleng, salah satunya pengawasan terhadap kualitas

laporan keuangan dilihat dari data yang mendukung laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan arahan pengawas yakni kepala UPTD di masing-masing unit. Laporan keuangan telah melampirkan pencatatan transaksi dan disertai dengan dokumentasi bukti transaksi. Hal ini sangat menentukan kualitas dari laporan keuangan yang dikerjakan. Pengawasan akan pembuatan laporan juga konsisten dilakukan demi menjaga kualitas serta kepercayaan masyarakat.

Hasil ini tentu mendukung teori-teori dari literatur-literatur yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari Putra (2017) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya jika pengawasan di dalam suatu SKPD baik, terkontrol, dan tersistem maka kualitas laporan keuangan daerah akan baik pula. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan (Baswir, 1988).

Melalui proses pengawasan ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan itu, pengawasan keuangan yang baik akan memberikan keyakinan mengenai kualitas laporan keuangan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis  $H_1$  menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut Mardiasmo (2006:18) definisi transparansi adalah sebagai berikut: "Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata

lain, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

Pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan (Baswir, 1988). Melalui proses pengawasan ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan itu, pengawasan keuangan yang baik akan memberikan keyakinan mengenai kualitas laporan keuangan.

Adapun saran yang penulis berikan kepada pihak UPTD PAD Kabupaten Buleleng yaitu Transparansi, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng maka perlu dilakukan upaya pelatihan dan penjadwalan yang teratur. Serta melakukan pelatihan bagi pegawai penyusun laporan keuangan untuk bersikap transparan dalam bekerja. Memberikan sosialisasi kepada pegawai mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan agar tidak melanggar hukum yang berlaku.

Pengawasan keuangan daerah, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka perlu dilakukan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan

pengawasan serta audit sehingga tupoksi dalam pembuatan laporan menjadi lebih terarah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah terkait meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kepada pihak terkait dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal, disarankan untuk melakukan peningkatan dalam hal keterbukaan atau transparansi serta pengawasan yang ketat terhadap pelaporan keuangan. pelaporan keuangan pemerintah daerah yang andal, disarankan untuk melakukan peningkatan dalam hal keterbukaan atau transparansi serta pengawasan yang ketat terhadap pelaporan keuangan.

Disarankan juga kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk mengembangkan lagi penelitian seperti ini yang tentunya lebih komprehensif dengan menambahkan variabel lainnya, sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,985. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 98,5% kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh transparansi dan pengawasan keuangan sedangkan 1,50 % dipengaruhi oleh variabel lain. Maka dari itu penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi dari penerapan kualitas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arfianti, Dita. 2011. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten batang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012*. Jakarta: BPK RI.

Baswir, Revrison. 1988. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Darwanis, dan Desi D. Mahayani. 2015. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol 2 No 2, Hal 133-151

Firdaus, Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa

- Hartadi, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Husein, Fakhri. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jogjakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Nahartyo, Indriasari, dan Desi, dan. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi, XI*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Prasetyo, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sriwijayanti. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Yosa. 2010. *Pengertian Pengawasan*, ([www.itjen-depdagri.go.id](http://www.itjen-depdagri.go.id), Diakses pada tanggal 24 Oktober 2020).